

PENGANTAR

TENTANG KILAS PENDIDIKAN

KILAS PENDIDIKAN memberikan informasi dan ulasan tentang berbagai kebijakan pendidikan secara ringkas. Sebagai bagian dari PSPK, KILAS menjadi kumpulan referensi penelitian dan pengembangan advokasi pendidikan serta menjadi cerminan misi PSPK. Kajian dan analisis tentang kompetensi guru yang dimuat pada edisi pertama ini, misalnya, adalah isu penting yang saat ini menjadi fokus kajian tim peneliti PSPK.

Diterbitkan setiap bulan, KILAS berupaya untuk mengangkat isu-isu kontekstual. Pada edisi perdana ini, ringkasan tentang analisis Kemdikbud tentang Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) disampaikan. Hasil analisis ini diharapkan menjadi satu diskursus penting dalam memposisikan data Ujian Nasional (UN) dan dampaknya sebagai alat ukur kemampuan peserta didik sekaligus indikator integritas para aktor pendidikan.

Tajuk Edisi Ini:

KEBIJAKAN NASIONAL

Indek Integritas Ujian Nasional: Mengukur Aspek Kejujuran

TINJAUAN

Kesetaraan dalam Pendidikan

Laporan World Bank *"An Unfair Start: How Unequal Opportunities Affect Indonesia's Children"*

Kebijakan di tingkat daerah, kabupaten, dan juga di sekolah turut disampaikan dalam KILAS sebagai bahan referensi tentang inovasi yang dilakukan di berbagai level, termasuk di akar rumput. Tujuannya adalah untuk mendorong replikasi praktik baik sekaligus menjadi referensi dalam mengambil langkah bagaimana berbagai gerakan pendidikan serta inisiatif yang telah dilakukan dapat didukung oleh pembuat kebijakan di berbagai level.

PSPK memandang pendidikan sebagai institusi yang terkait dengan institusi lainnya dalam suatu sistem sehingga kemajuan pendidikan tidak lepas dari kebijakan institusi lain, seperti kesehatan, ekonomi, dan politik. Karena itulah, pada edisi pertama ini KILAS menyajikan ringkasan tentang laporan yang diterbitkan World Bank terkait dengan kesenjangan di antara anak-anak Indonesia dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

ANALISIS & REKOMENDASI

Kompetensi Kepribadian Guru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

INOVASI SEKOLAH

Relevansi Kegiatan Belajar: Pasca-bom Thamrin

AGENDA PSPK

Riset Mandiri PSPK: Dampak (*Washback Effect*) Uji Kompetensi Guru

Pemimpin Redaksi: Nisa Faridz **Redaktur:** 1. Henny Supolo Sitepu 2. Ifa H. Misbach 3. Najelaa Shihab

Editor: Siti Nur Andini **Kontributor Tamu:** Annisa Martadila



SHARE



TWEET



FORWARD

INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL: MENGUKUR ASPEK KEJUJURAN

Pada 21 Desember 2015 lalu, Presiden RI Joko Widodo mengundang 503 kepala sekolah ke Istana Negara sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tertinggi dan konsisten selama enam tahun terakhir. IIUN bertujuan memetakan kejujuran proses UN yang dilakukan oleh sekolah dan daerah. Meskipun pemerintah telah mengukur IIUN selama enam tahun terakhir, namun baru pada tahun 2015 hasil pengukuran diumumkan secara terbuka. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, justru capaian nilai UN tertinggi tidak diumumkan. Meletakkan integritas sebagai prioritas utama, Kemdikbud menyatakan hasil pemetaan IIUN tidak menggembirakan dengan sebagian besar sekolah/daerah mencatat IIUN yang tergolong rendah.

Menurut penjelasan dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud, IIUN diukur dengan menggunakan metode *pairwise* secara individu, yaitu membandingkan satu individu dengan individu lainnya, serta metode kumulatif, yaitu dengan menganalisis keseragaman pola dalam satu sekolah. Keluaran yang dihasilkan dalam pengukuran IIUN oleh Puspendik adalah:

1. Indeks *pairwise* siswa dibandingkan dengan siswa lain pada sekolah yang sama
2. Indeks *pairwise* siswa dibandingkan dengan siswa lain pada kabupaten/kota yang sama
3. Indeks keseragaman pola jawaban, berupa persentase soal yang dijawab identik oleh minimal 80% siswa dalam sekolah yang dapat diperoleh tanpa memiliki kunci jawaban
4. Indeks kumulatif delta, berupa persentase pola respons minimal 80% siswa dalam satu sekolah, yang telah disesuaikan dengan mutu sekolah dan tingkat kesukaran nasional

Dalam paparan laporan hasil pemetaan UN dan IIUN di hadapan para Kepala Dinas Pendidikan Daerah dan pegiat pendidikan, Puspendik menyatakan telah tampak dua penanda yang menunjukkan bahwa IIUN menjalankan fungsinya sebagai indikator kejujuran proses UN di sekolah dan daerah.

Pertama, ketika seluruh nilai UN dianalisis korelasinya dengan berbagai faktor pengaruh (termasuk faktor ini adalah delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), nilai UKG, dan sebagainya), maka tidak tampak pola korelasi yang signifikan. Sebaliknya, ketika hasil UN dengan nilai IIUN yang rendah dikeluarkan dari dataset, maka hasil UN dengan nilai IIUN yang tinggi menunjukkan pola korelasi dengan berbagai faktor

pengaruh tadi. Analisis terhadap nilai UN yang telah dibersihkan dengan IIUN menunjukkan korelasi positif dengan seluruh faktor SNP, terutama faktor Standar Pendidik yang menunjukkan korelasi terkuat.

Kedua, ketika dilakukan analisis terhadap sekolah-sekolah yang baru saja mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2015, di mana kesamaan pola jawaban tak dapat dievaluasi karena kombinasi jenis soal yang begitu luas dan tak memungkinkan kecurangan massal, maka sekolah-sekolah dengan nilai IIUN tinggi pada tahun sebelumnya tidak menunjukkan perubahan nilai UN yang signifikan dari tahun ke tahun. Artinya, sekolah dengan capaian nilai UN rendah pada tahun sebelumnya tetap memperoleh capaian nilai UN rendah di tahun berikutnya, begitu juga sebaliknya. Namun, pola yang konsisten ini tidak tampak pada sekolah-sekolah dengan nilai IIUN rendah. Nilai UN pada UNBK mereka kali ini mengalami penurunan capaian nilai yang signifikan dibandingkan dengan UN berbasis pensil dan kertas pada tahun sebelumnya.

IIUN adalah salah satu kajian yang dilakukan untuk transisi dari orientasi yang sangat menitikberatkan hasil akhir dibanding proses belajar, menuju pola pikir bahwa UN bukan satu-satunya ukuran kualitas proses belajar. IIUN mengingatkan bahwa hasil UN tidak sepenuhnya mencerminkan mutu pendidikan individu, pendidik, ataupun sekolah.

IIUN sebagai sebuah parameter baru dalam ekosistem penilaian pendidikan di Indonesia adalah hal yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Selain kajian tentang metode pengukuran IIUN, posisinya sebagai insentif/disinsentif terhadap perilaku yang ingin dibentuk dari para pelaku pendidikan juga perlu menjadi perhatian peneliti dan pembuat kebijakan pendidikan.

Kehati-hatian dalam melakukan interpretasi dan menempatkan IIUN mutlak diperhatikan oleh Kemdikbud. Keberadaan IIUN sebaiknya tidak menjadi disinsentif baru yang menafikan usaha pemerintah untuk mengurangi sifat UN sebagai *high-stake test*. IIUN juga jangan sampai menjadi alat penghakiman kolektif terhadap setiap pelaku pendidikan dan terhadap setiap aspek integritas di sekolah dan daerah. Sebagai alat ukur, IIUN mempunyai batasan sehingga ia bukan Indeks Integritas Sekolah atau Daerah yang mengukur seluruh aspek kegiatan dan ekosistem satuan pendidikan. Kita sepakat bahwa integritas adalah sesuatu yang mutlak dalam pendidikan. Upaya untuk mencapainya tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan memublikasikan IIUN. Di sisi lain, diagnosis lebih dalam terhadap fungsi utama UN sebagai indikator pencapaian kompetensi siswa juga sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam kerangka percepatan peningkatan mutu secara komprehensif.

KESETARAAN DALAM PENDIDIKAN

Kesetaraan kesempatan dalam pendidikan atau *equal educational opportunities* adalah suatu area kajian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan, baik dalam akses pendidikan maupun hasil proses belajar. Faktor-faktor yang biasanya digunakan dalam mengukur kesempatan pendidikan tidak hanya terkait langsung dengan institusi sekolah, seperti kualitas guru, kurikulum, fasilitas, dan lain-lain; tetapi juga faktor terkait input pendidikan, yang dalam hal ini adalah faktor luar sekolah. Termasuk dalam faktor luar sekolah adalah tingkat pendidikan dan penghasilan orangtua, tingkat kemiskinan, akses ke layanan kesehatan, dan juga lingkungan tempat tinggal anak didik. Berbagai penelitian* tentang *educational opportunities* di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa faktor luar sekolah berpengaruh sangat kuat dalam menentukan kualitas proses dan hasil belajar.

Pada November 2015, World Bank Indonesia menerbitkan sebuah laporan yang menyoroti ketidaksetaraan *educational opportunities* di antara anak-anak Indonesia. Laporan yang berjudul “*An Unfair Start: How Unequal Opportunities Affect Indonesia’s Children*” ini memaparkan berbagai bentuk kesenjangan sosial ekonomi. Salah satu poin penting yang disampaikannya adalah korelasi yang lemah antara tingkat pendidikan dan penghasilan (*income*) seseorang. Faktor luar sekolah, yaitu “di mana” seseorang dilahirkan dan dibesarkan (di kota atau di desa, dalam keluarga dengan tingkat sosial ekonomi mana, dan di lingkungan dengan fasilitas kesehatan dan infrastruktur seperti apa) memberikan dampak yang nyata. Jika seseorang tumbuh dan sekolah di wilayah pedesaan yang cukup terisolasi, tumbuh di keluarga miskin dengan orangtua berpendidikan relatif rendah, maka dapat diperkirakan penghasilannya akan lebih rendah dibandingkan orang lain yang berpendidikan setaraf dengannya, namun dari kondisi keluarga dan lingkungan yang berbeda.

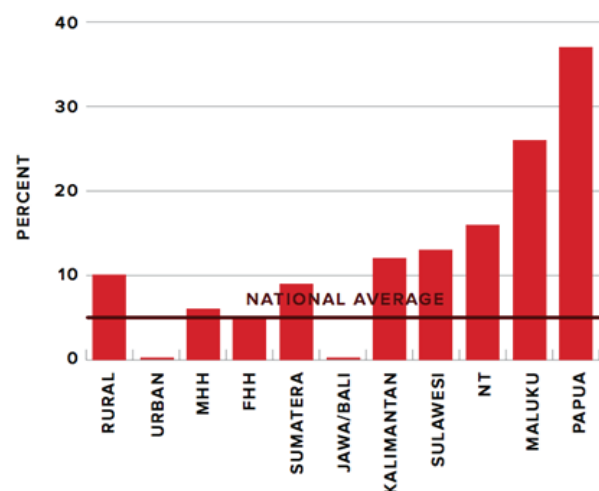
Tumbuh di wilayah pedesaan dan keluarga yang miskin berdampak pada akses seseorang ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta kualitas pendidikan yang tersedia untuknya. Terlebih lagi, sumber daya dan fasilitas sekolah menjadi

tantangan besar di wilayah-wilayah pedesaan, dan hal ini berkontribusi pada melebarnya kesenjangan *educational opportunities*. Lebih dari 10% sekolah di Indonesia masih belum memiliki kebutuhan dasar, seperti listrik dan air bersih di toilet sekolah** yang sebenarnya sangat kritis dalam proses belajar.

An Unfair Start menekankan keterbatasan kesempatan belajar yang harus dialami sebagian anak-anak Indonesia sejak lahir. Laporan ini juga memberikan perspektif yang lebih makro dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada kualitas hasil belajar. Walaupun tidak dipungkiri bahwa peningkatan mutu sekolah yang tersedia untuk anak-anak pedesaan dan anak-anak dari keluarga miskin harus ditingkatkan, namun kesuksesan pendidikan mereka juga tidak lepas dari faktor-faktor luar sekolah, diantaranya yang dilaporkan dalam *An Unfair Start*, yaitu kualitas pelayanan sektor kesehatan dan infrastruktur transportasi di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai tantangan yang harus dihadapi anak-anak Indonesia dalam mengikuti proses belajar ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh guru atau pihak sekolah. Kebijakan lintas sektoral yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kualitas pendidikan anak-anak di berbagai wilayah sangat dibutuhkan. Selain itu, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, sosial, dan kesehatan untuk anak-anak dari keluarga miskin juga menjadi sebuah urgensi.

Dua grafik berikut diambil dari halaman 20 laporan di atas.

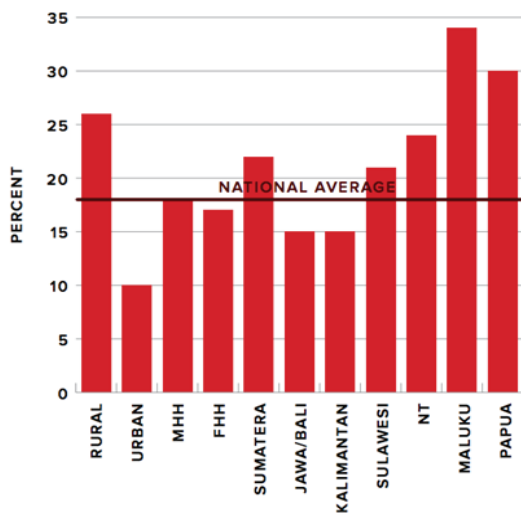
Grafik 1. Persentase anak-anak yang tidak memiliki akses ke Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan fasilitas listrik



SOURCE Susenas 2011 and Podes 2011.

NOTE MHH are male-headed households, FHH are female-headed households.

Grafik 2. Persentase anak-anak yang tidak memiliki akses ke Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan air bersih di toiletnya



SOURCE Susenas 2011 and Podes 2011.
NOTE MHH are male-headed households, FHH are female-headed households.

* Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Baker, D.P., Goesling, B., & Letendre, G.K. tahun 2002 berjudul *“Socioeconomic Status, School Quality, and National Economic Development: A Cross-national Analysis of the ‘Heyneman-Loxley Effect’ on Mathematics and Science Achievement”* yang menggunakan data TIMSS untuk membandingkan faktor sekolah dengan status sosial ekonomi di beberapa negara berkembang. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa latar belakang keluarga berdampak lebih besar terhadap hasil TIMSS dibandingkan dengan efek sekolah.

** Dalam studi kasus yang dilakukan Lloyd, Mensch, dan Clark (2000) di Pedesaan di Kenya, kondisi toilet dan ketersediaan air bersih adalah faktor penting. Ketika datang bulan, murid perempuan sering kali memutuskan untuk tidak masuk sekolah karena kendala ini.

Laporan World Bank: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/12/29/090224b083c31b7f/1_0/Rendered/PDF/A0unequa0c0nd0en.pdf

INOVASI SEKOLAH

RELEVANSI KEGIATAN BELAJAR: PASCA-BOM THAMRIN

Proses dan materi belajar yang berorientasi pada anti-terorisme telah menjadi diskursus penting dalam kebijakan pendidikan. Mendiskusikan secara kritis tentang ideologi dan kompleksitas sosial politik di balik berbagai tragedi serangan kelompok teroris menjadi salah satu tuntutan dalam kurikulum sekolah-sekolah di banyak negara. Dengan mengglobalnya isu kekerasan semacam ini, KILAS menyoroti kegiatan yang dilakukan di sekolah dasar swasta maupun negeri di Jakarta Selatan untuk merespons tragedi bom yang terjadi pada 14 Januari 2016 ini.

Di Sekolah Kembang dan SDN 13 Cilandak pada hari Jumat, 15 Januari 2016, guru-guru sekolah ini sepakat bahwa kegiatan pembuka dikhususkan untuk membicarakan tragedi “Bom Thamrin” yang terjadi pada hari sebelumnya. Panduan bicara tentang terorisme yang dikeluarkan Kemdikbud, juga penyedia materi pendidikan: Keluarga Kita dan Tiga Generasi, menjadi rujukan yang digunakan dalam kegiatan ini, terutama dalam memandu proses tanya jawab antara guru dengan siswa. Panduan

ini membantu guru untuk fokus pada hal-hal yang penting untuk dipahami siswa, sekaligus menjadi penanda agar dapat memandu pemahaman siswa mengenai teror kekerasan, bertindak dalam situasi darurat, dan memahami informasi. Meskipun panduan tersebut dinilai sangat membantu proses diskusi di sekolah, sekurang-kurangnya ada tiga faktor lain yang membuat guru merasa leluasa untuk mendiskusikan secara kritis hal-hal yang cukup sensitif.

Pertama, kegiatan tanya jawab yang dipandu guru untuk membahas isu agar siswa berpikir reflektif dan kritis adalah kegiatan yang rutin dilakukan. Membicarakan hal-hal yang menarik perhatian siswa maupun guru sekaligus hal-hal yang kontekstual meningkatkan keterlibatan dan makna pembelajaran.

Kedua, budaya dan iklim sekolah yang inklusif menghargai perbedaan dan memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat sehingga membuat komunikasi sesama guru, antara guru dengan siswa, dan juga antara guru dengan pimpinan sekolah menjadi lebih terbuka. Mereka senantiasa merasa aman (tidak takut) mengeluarkan pendapat, perasaan, dan pandangan yang mungkin dianggap kontroversial.

Ketiga, komunikasi terbuka dan berkesinambungan antara guru dengan orangtua siswa membuat guru tidak khawatir untuk mendiskusikan isu sosial, seperti kasus terorisme ini. Guru tidak saja mengenal orangtua siswa, namun dari komunikasi dua arah dan berkelanjutan, kesamaan visi antara guru dengan orangtua semakin terbangun. Hal ini membuat guru percaya bahwa orangtua tidak akan keberatan dengan materi diskusi yang mereka lakukan.

Kesamaan visi membuat guru tidak segan dan tidak menutup diri dari pertanyaan-pertanyaan kritis yang disampaikan siswa sebab guru tahu bahwa orangtua siswa pun akan mengajarkan hal serupa.

Narasumber:

Sekar Ayu Adhaningrum, Koordinator Guru Kelas 1-3 & Guru Kelas 3, Sekolah Kembang.

Sri Lestari, Guru Kelas V, SDN 13 Cilandak Barat.

ANALISIS & REKOMENDASI

KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU DALAM PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 74 TAHUN 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Kompetensi Guru diterbitkan sebagai amanat dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru pasal 10 ayat (1) dan Bab II PP No. 74 Tahun 2008 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Untuk mengetahui kompetensi pedagogik dan profesional, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) telah melakukan Uji Kompetensi Guru (UKG). Namun, instrumen UKG belum dapat digunakan mengukur kedua kompetensi lain, yaitu kompetensi kepribadian dan sosial.

Fokus pada pengukuran kompetensi kepribadian, PP No.74 Tahun 2008 Bagian I, Pasal 2, ayat 5 menyatakan bahwa kompetensi kepribadian mencakup indikator sebagai berikut: a. beriman dan bertakwa; b. berakhlak mulia; c. arif dan bijaksana; d. demokratis; e. mantap; f. berwibawa; g. stabil; h. dewasa; i. jujur; j. sportif; k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; l. secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri; m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masing-masing indikator perilaku dalam kompetensi

kepribadian di atas terlihat tumpang tindih, abstrak, dan mengawang-awang sehingga sulit didefinisikan dengan jernih. Misalnya, apa yang dimaksud dengan dewasa dan mantap? Apa makna dari arif dan bijaksana? Bagaimana mengukur akhlak mulia? Dari banyaknya alternatif standar normatif yang berkembang di budaya masyarakat Indonesia yang majemuk, standar mana yang akan digunakan? Serta bagaimana jika norma agama dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia ternyata tidak konsisten dan saling bertentangan?

Pengukuran yang valid terhadap sebuah konstruk mustahil dilakukan tanpa landasan teori yang akurat, berimbang, dan tanpa definisi yang jernih tentang konstruk tersebut. Mengukur dan menilai penguasaan guru terhadap kompetensi profesional dan pedagogik saja sudah sangat kompleks, apalagi ditambah dengan kompetensi kepribadian yang landasan pijakan teori dan asumsinya masih belum terumuskan dengan baik.

Dalam kajian psikologi, kepribadian adalah konsep yang berbeda dari *“soft competence”* (seperti kompetensi kepribadian dan sosial yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah di atas). Kepribadian merujuk pada sifat yang menjelaskan kekhasan pola pikir, perasaan, dan perilaku tiap individu. Seorang ahli psikologi kepribadian terkemuka, Gordon W. Allport (Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, 2005) mengemukakan satu rumusan tentang kepribadian yang dianggap lebih lengkap, yaitu: *“Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.”* Dari definisi tersebut, kata kuncinya adalah penyesuaian diri. Ahli psikologi kepribadian

Schneider (1964) merumuskan penyesuaian diri yang dimaksud Allport adalah “suatu proses respons individu, baik berupa perilaku yang dapat dilihat langsung (*overt*) maupun perilaku yang tidak dapat dilihat langsung (*covert*) yang juga disebut sebagai proses mental, sebagai upaya untuk mengatasi kebutuhan, ketegangan emosional, frustrasi dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan lingkungan”.

Untuk lebih memperjelas tentang kepribadian individu, kepribadian terbagi menjadi beberapa jenis mendasar, yang disebut sebagai penggolongan atau tipologi kepribadian, misalnya *introvert* – *ekstrovert*, dan tipologi lainnya. Meski ada banyak teori yang mengusulkan tipologi kepribadian dengan pendekatan kategorisasi yang berbeda-beda, semua teori sepakat bahwa kepribadian sulit untuk diubah dengan cepat karena menyangkut faktor bawaan. Jadi, kepribadian adalah konsep yang tidak beriringan, bahkan bertolak belakang dengan “kompetensi” atau *knowledge* dan berbagai bentuk perilaku yang dapat diubah dengan melakukan intervensi dari lingkungan, misalnya dalam dalam

bentuk target instruksional, seminar, dan pelatihan. Sebagai kesimpulan, istilah “kompetensi kepribadian” menunjukkan kekeliruan penggabungan konsep pembentuknya (kepribadian dan kompetensi). Ketidakhati-hatian ini memunculkan keraguan; sebenarnya mana yang hendak diukur: kepribadian ataukah kompetensi? Kemudian jika kepribadian menjadi fokus pengukuran, teori atau tipologi manakah yang akan menjadi acuan? Apa argumen yang melandasi keterkaitan antara tipe kepribadian dengan kemampuan pedagogik mengajar sebagai guru? Selanjutnya lagi, karena secara alami kepribadian setiap manusia pasti ada variasinya, apa yang mendasari argumen untuk menyatakan satu tipe kepribadian lebih layak untuk guru daripada tipe lainnya? Disinsentif apa yang akan diberikan kepada guru yang mempunyai tipe kepribadian yang dianggap tidak cocok untuk menjadi pengajar, mengingat kepribadian sulit diubah dengan cepat? Pertanyaan-pertanyaan ini mengindikasikan perlunya perumusan kembali makna kepribadian serta pertimbangan ulang untuk meletakkan kepribadian sebagai kompetensi seperti yang tercantum dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang kompetensi guru.

AGENDA PSPK

RISET MANDIRI PSPK: DAMPAK (WASHBACK EFFECT) UJI KOMPETENSI GURU

Tes yang memiliki konsekuensi penting bagi peserta tes (*high-stake*) dapat membuat para peserta melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan tanpa adanya tes tersebut. Dampak ini bisa positif maupun negatif. Dalam kasus Uji Kompetensi Guru (UKG), dampak positif yang diharapkan adalah adanya usaha guru untuk meningkatkan penguasaan materi pelajaran serta keterampilan pedagogik.

Diperlukan data empiris untuk mengetahui seberapa jauh dampak positif ini memang terjadi. Dampak negatif lebih sulit diterka, dan karena itu penting untuk ditelaah secara empiris agar dapat diantisipasi oleh pengambil kebijakan.

Penelitian PSPK mengenai topik ini menggabungkan pendekatan kualitatif (wawancara) dengan kuantitatif (survei) untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang dimensi penyebab dari pencapaian dalam UKG, persiapan yang dilakukan untuk UKG, dan respons terhadap hasil UKG, kaitan antara profil guru dengan respons mereka, serta dampak potensialnya pada perilaku dan motivasi guru.

